

# Perspektif Kebijakan Publik

# What is Public Policy?

- Policy is: “*Whatever governments choose to do or not to do* (apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah) (Dye, 1975).
- “...jalan atau cara bagi lembaga yang berperan sebagai pemegang kewenangan publik (dalam hal ini pemerintah) untuk mengatasi suatu permasalahan atau sekelompok permasalahan yang saling berhubungan” (Pal, 1992).

# What is...(2)

- *A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (serangkaian tindakan yang dipilih secara sengaja oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang dimaksudkan untuk mengatasi suatu masalah) (Anderson, 1984).
- Adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan, maupun implementasinya dengan menggunakan instrumen tertentu (World Agroforestry, 2003).

# What is...(3)

- Meskipun setiap hari masyarakat dihadapkan pada berbagai isu kebijakan publik akan tetapi tidak ada pemahan yang sama apa yang dimaksud sebagai kebijakan.
  1. Policy as a label for field of activity
  2. Policy as an expression of general purpose or desired state of affairs
  3. Policy as specific proposals
  4. Policy as decision of government
  5. Policy as formal authorization
  6. Policy as a programme
  7. Policy as output
  8. Policy as outcome
  9. Policy as a theory or model
  10. Policy as process

# Kebijakan Sebagai Suatu Model

- Model kelembagaan: Kebijakan dipandang sebagai kegiatan lembaga-lembaga pemerintah
- Tiga ciri yang menonjol dalam model ini:
  - Pemerintah memberikan legitimasi/pengesahan terhadap kebijakan publik.
  - Kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga pemerintah bersifat universal
  - Pemerintah memiliki hak memonopoli penggunaan paksaan/kekerasan untuk mengimplementasikan kebijakannya.

# Kebijakan Sebagai Model...(2)

- Model kelompok: Kebijakan dipandang sebagai hasil keseimbangan kelompok. *“what may be called public policy is actually the equilibrium reached in the group struggle at any given moment, and it represents a balance which the contending factions or group constantly strive to tip in their favor...The legislature referees the group struggle, ratifies the victories of the successful coalition, and records the terms of the surrenders, compromises, and conquest in the form of statutes”* (Dye, 1978).

# Kebijakan Sebagai Model...(3)

- **Model Elite: Kebijakan dipandang sebagai preferensi elite.**
- Pendekatan ini berasumsi bahwa dalam masyarakat kekuasaan tidak terdistribusi secara merata di mana ada kecenderungan kekuasaan politik terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil warga masyarakat sehingga menimbulkan kelompok penguasa dan yang dikuasai (*a class that rules and a class that is ruled*).
- Asumsi-asumsi yang dipakai:
  - Masyarakat terbagi dalam dua klas: klas penguasa jumlahnya sedikit dan menjalankan fungsi2 politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan2 dari kekuasaan tersebut.
  - Klas yang kedua jumlahnya banyak, merupakan pihak yang diarahkan dan dikontrol.
  - Pergeseran posisi dari bukan elite ke klas elit akan berlangsung lambat dan lama
  - Golongan elite memiliki persamaan nilai
  - Kebijakan negara tidak mencerminkan tuntutan masyarakat, tetapi golongan elite
  - Rakyat secara umum bersikap pasif, golongan elite yang lebih aktif mempengaruhi negara

# Kebijakan Sebagai Model...(3)

- **Model Rasional: Kebijakan Dipandang Sebagai Pencapaian Tujuan Secara Efisien.**
- Kebijakan dipandang sebagai pilihan rasional dari serangkaian alternatif yang ada untuk memecahkan masalah publik
- Tahap-tahap yang dilakukan:
  - Mengetahui seluruh nilai2 masyarakat dan memberi bobot
  - Mengetahui secara tepat alternatif2 kebijakan yang tersedia
  - Mengetahui semua akibat yang mungkin terjadi dari setiap alternatif kebijakan yang dipilih
  - Menghitung nisbah antara nilai yang dicapai dengan pengorbanan yang diberikan oleh masyarakat
  - Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.
- Kelemahan model ini adalah keterbatasan rasionalitas manusia dalam mengidentifikasi alternatif yang mungkin untuk dipilih (bounded rationality).



# Kebijakan Sebagai Model...(4)

- **Model Inkremental: Kebijakan dipandang sebagai variasi kebijakan-kebijakan sebelumnya.**
- Model inkremental mengatakan bahwa kebijakan merupakan kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dengan perubahan seperlunya.
- Asumsi:
  - Policy maker enggan berfikir secara menyeluruh tentang suatu kebijakan
  - Jika kebijakan gagal akan diambil langkah2 perbaikan seperlunya
  - Sedikit masalah kebijakan yang bisa diselesaikan secara tuntas
  - Kebijakan biasanya dibuat oleh banyak pihak sehingga perlu kesepakatan
  - Ada negosiasi dalam pembuatan kebijakan yang melibatkan multi stakeholders
  - Negosiasi memunculkan bukan kebijakan yang terbaik, tapi yang memuaskan semua pihak

# Kebijakan sebagai model...(4)

- Model Sistem: Kebijakan dipandang sebagai output dari sistem.
- Menurut logika ini ( yang banyak dipengaruhi oleh pandangan David Easton) kebijakan merupakan produk bekerjanya sebuah sistem politik yang dilakukan melalui proses:
  - Pemberian input (tuntutan2 kebijakan)
  - Konversi (formulasi kebijakan)
  - Output (hasil2 atau outcome kebijakan)

# Unsur-Unsur Pokok Kebijakan

- Masalah yang akan diatasi dengan kebijakan
- Cara untuk mengatasi masalah tersebut
- Tujuan yang akan dicapai
- Aktor atau organisasi yang akan mengimplementasikannya
- Instrumen atau perangkat untuk melaksanakan kebijakan tersebut
- Aturan untuk menggunakan instrumen tersebut (SOP).
- Kelompok sasaran kebijakan (*target group*).

# Berbagai Isu Penting Menyangkut Kebijakan Publik

- Siapa stakeholders yang terlibat
- Bagaimana proses perumusan kebijakan dilakukan
- Bagaimana implementasi dilakukan
- Apa hasil-hasil kebijakan
- Apakah hasil-hasil kebijakan mampu mencapai tujuan kebijakan, termasuk di dalamnya memuaskan nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat